Topan Diperintahkan Terima Suap .....

Dari Halaman 1

dalam penyidikan kasus di Sumut itu, yakni alur perintah serta aliran dana terkait tindak pidana korupsi.

"Alur perintahnya tentunya mendahului dari proses tadi kan. Pasti perintahnya dulu kan awalnya, memerintahkan gini-gini, baru dieksekusi. Setelah dieksekusi, baru uangnya dibagikan," ujar dia.

Sebelumnya, pada 26 Juni 2025, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

Selanjutnya, pada 28 Juni 2025, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus yang terbagi menjadi dua klaster tersebut, yakni Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting (TOP), Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Gunung Tua Dinas PUPR Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen Rasuli Efendi Siregar (RES).

Kemudian, PPK di Satker PJN Wilayah I Sumut Heliyanto (HEL), Dirut PT Dalihan Natolu Group M. Akhirun Efendi (KIR), dan Direktur PT Rona Na Mora M. Rayhan Dulasmi Piliang (RAY).

Klaster pertama berkaitan dengan empat proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut, sedangkan klaster kedua terkait dua proyek di Satker PJN Wilayah I Sumut.

Total nilai enam proyek di dua klaster tersebut sekitar Rp231,8 miliar. Untuk peran para tersangka, KPK menduga M. Akhirun Efendi dan M. Rayhan Dulasmi Piliang sebagai pemberi dana suap.

Sementara penerima dana di klaster pertama adalah Topan Obaja Putra Ginting dan Rasuli Efendi Siregar, sedangkan di klaster kedua adalah Heliyanto.**(ant/js)**

Dentuman Meriam Bersahut-sahutan .....

Dari Halaman 1

Darat Thailand Ritcha Suksuwanon, pasukan Kamboja mulai menembakkan artileri sekitar pukul 04.00 pagi.

Ini merupakan hari keempat Thailand dan Kamboja berperang di perbatasan, sejak pertama pecah pada Kamis (24/7). Perang meletus setelah militer kedua negara terlibat baku tembak buntut konflik di wilayah sengketa yang telah terjadi bertahun-tahun.

Setidaknya 33 orang dikonfirmasi tewas imbas perang kedua negara ASEAN ini. Lebih dari 200 ribu orang juga terpaksa mengungsi.

Thailand dan Kamboja telah menyatakan kesediaan untuk memulai pembicaraan gencatan senjata setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menelepon perwakilan kedua negara pada Sabtu (26/7).

Trump mengultimatum Thailand dan Kamboja untuk segera menghentikan perang jika ingin melanjutkan negosiasi soal tarif impor dengan Washington.

Sama seperti negara lainnya, AS mengenakan barang-barang asal Kamboja dan Thailand bea impor tinggi, yakni sebesar 36 persen**. (cnni/js)**

UU Kementerian Digugat .....

Dari Halaman 1

melalui keterangan tertulis, Minggu (27/7).

Viktor menjelaskan, alasan permohonan tersebut diajukan karena hingga kini praktik rangkap jabatan wakil menteri menjadi komisaris pada perusahaan milik negara (BUMN) masih terjadi. Berdasarkan catatannya, ada 30 wakil menteri yang merangkap sebagai komisaris BUMN.

"Oleh karenanya saya merasa perlu menguji dan menegaskan Pasal 23 UU 39/2008 yang menyatakan 'Menteri dilarang merangkap jabatan' dianggap bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan UUD 1945 jika tidak dimaknai 'Termasuk Wakil Menteri'," ucap Viktor.

"Tujuannya agar Mahkamah Konstitusi tidak hanya memuat penjelasan pada bagian pertimbangan hukum saja sebagaimana termuat dalam Putusan No. 80/PUU-XVII/2019, namun harus memuat dalam amar putusan sehingga menghilangkan perdebatan atas keberlakuan mengikat larangan rangkap jabatan tersebut," imbuhnya.

Viktor mengaku merasa memiliki tanggung jawab sebagai warga negara yang berprofesi sebagai Advokat (penegak hukum) yang menaruh atensi pada penegakan nilai-nilai konstitusionalisme.

Sebab, selain sebagai Advokat, Viktor juga menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Pengacara Konstitusi (badan hukum) yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.

Lebih lanjut, Viktor menganggap kerugian konstitusional yang dialami bersifat spesifik dan aktual, dengan adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian tersebut dan berlakunya Pasal yang dimohonkan pengujian.

Hal itu karena lewat rangkap jabatan komisaris oleh wakil menteri, maka pengawasan di perusahaan-perusahaan milik negara menjadi tidak optimal sebagaimana tugas dan tanggung jawab dewan komisaris yang diatur dalam UU BUMN dan UU Perseroan Terbatas (PT), sehingga menyebabkan kerugian-kerugian perusahaan dan terjadi praktik korupsi dan kolusi.

"Hal itu tentunya berpengaruh kepada pemohon sebagai konsumen seperti contoh harus mendapatkan BBM oplosan saat mengisi BBM di SPBU Milik Pertamina," imbuhnya.

Menurut Viktor, Pasal 23 UU 39/2008 yang melarang menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta, atau pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN/APBD, belum secara eksplisit mengatur wakil menteri.

Sementara, penjelasan MK pada bagian pertimbangan hukum Putusan Nomor: 80/PUU-XVII/2019 terhadap Pasal 23 UU 39/2008 berlaku juga untuk Wakil Menteri dinilai tidak mengikat, karena objek Pasal yang di Uji dalam putusan a quo bukanlah Pasal 23, melainkan Pasal 10 yang mengatur mengenai kedudukan wakil menteri.

"Sehingga penjelasan MK pada bagian pertimbangan hukum dinilai bukanlah merupakan ratio decidendi, namun sejenis obitur dicta yang tidak mengikat," ungkap Viktor.

Viktor menjelaskan hal itu mendasarkan pemerintah melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan bahkan Ketua MPR RI berpendapat bahwa penjelasan MK dalam Putusan No. 80/PUU-XVII/2025 tidak mengikat.

Sementara dalam Putusan No. 76/PUU-XVIII/2020 dan Putusan 21/PUU-XXIII/2025, MK tidak mempertimbangkan pokok perkara sama sekali karena pada pokoknya MK menilai pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum. **(cnni/js)**

Bobby Lantik Direksi dan Komisaris 2 BUMD .....

Dari Halaman 1

Para pejabat yang dilantik adalah Direktur Utama PT PPSU Ferry Indra, Direktur Keuangan dan Umum PT PPSU Zia Muhammad, Dewan Komisaris PT PPSU Muhammad Syarif Lubis, Direktur Utama PT Dirga Surya Ari Wibowo, dan Anggota Komisaris PT Dirga Surya Lokot Ridwan Batubara.

Dalam arahannya, Bobby Nasution meminta kepada para pejabat yang baru dilantik untuk segera membuat rencana strategis bisnis, yang tujuannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan latar belakang para direksi yang luar biasa, Bobby pun yakin, mereka bisa menjadikan BUMD sebagai salah satu roda penggerak perekonomian dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sumut.

"Kenapa pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan? Presiden sudah menetapkan pertumbuhan ekonomi 8%. Untuk mencapai 8%, Sumut yang merupakan provinsi terbesar keempat di Indonesia, minimal pertumbuhan ekonominya 6,5% sampai 7%, agar bisa mencapai pertumbuhan 8% pertumbuhan ekonomi nasional tadi," ucapnya.

Bobby mengatakan, banyak faktor pembentuk angka pertumbuhan ekonomi tersebut, salah satunya investasi yang harus tercapai agar target pertumbuhan ekonomi 6,5% sampai 7% tadi bisa terealisasi. "Tantangan di sektor ekonomi untuk BUMD mempunyai dua peran, yakni tanggungjawab ke masyarakat dan meningkatkan PAD yang ada di Sumut," ujar Bobby.

Kepada Ari Wibowo, yang baru ditetapkan menjadi Dirut PT Dirga Surya, Bobby meminta agar segera menetapkan bisnis plan yang jelas.

"Mau ke arah mana. Pertanian sudah mulai merambah, apakah sektor pariwisata? Masih banyak sektor pariwisata yang harusnya bisa disentuh. Kalau perlu buat satu kawasan pariwisata, pelajari bagaimana membuat satu kawasan," ujarnya.

Bobby mengatakan, PT PPSU mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Dengan luas lahan yang cukup besar, Bobby meminta agar PT PPSU memaksimalkan lahan tersebut.

"Saya yakin para direksi yang ditetapkan bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya. Harus bisa meningkatkan pendapatannya," pungkas Bobby.

Turut hadir pada acara tersebut Wakil Gubernur Sumut Surya, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Togap Simangunsong, pimpinan BUMD, kepala perangkat daerah, dan undangan lainnya. **(A-05)**

Toyota Calya Bawa 9 Penumpang Dihantam .....

Dari Halaman 1

"Begitu mendapat laporan, kami langsung menggerakkan seluruh kekuatan untuk melakukan evakuasi dan penanganan korban," kata Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang melalui Kasi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba, Minggu (27/7/2025).

AKP Very mengatakan peristiwa bermula saat mobil Toyota Calya BK 1721 RZ yang dikemudikan Yusni Marzuki Sinaga (43) membawa sembilan penumpang datang dari Binjai. Kemudian Kereta Api 2803 Kisaran Express yang dikemudikan masinis Hardian S datang dari arah Asahan menuju Medan.

"Pengemudi mobil diduga kurang hati hati saat melintas di perlintasan sebidang tanpa palang pintu sehingga tabrakan tak terhindari. Akibat tabrakan mobil Calya terseret sekitar 50 meter dan terlempar ke sebelah kanan rel," jelasnya.

Dalam insiden ini, tiga orang meninggal dunia yakni Siti Marlina (40) dan anaknya M. Alzam (2) dan Zulkifli (30). Sementara pengemudi mobil Yusni Marzuki Sinaga bersama enam penumpang lainnya mengalami luka berat. Seluruh korban merupakan warga Jalan Gunung Kidul, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai.

"Seluruh korban merupakan penumpang mobil Toyota Calya. Korban selamat dan meninggal dunia dievakuasi menggunakan Ambulans ke RS Karya Husada" paparnya.

Menurutnya tim penyelidik mengamankan barang bukti dan mengumpulkan keterangan saksi. Kerugian material akibat kecelakaan ini diperkirakan mencapai Rp75 juta dengan kerusakan parah pada sisi kiri mobil Calya meliputi kaca depan, kaca samping kiri, bumper depan, pintu sebelah kiri, dan ban sebelah kiri. Sementara Kereta Api 2803 Kisaran Express tidak mengalami kerusakan.

"Polisi menetapkan pengemudi mobil Calya sebagai tersangka karena melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perlintasan sebidang tanpa palang pintu memang rawan, tetapi pengendara harus lebih berhati-hati," jelasnya. **(cnni/js)**

Tersesak Ular Besi, Tersisih Pembangunan .....

Dari Halaman 1

kereta api - betul-betul di bawahnya.

Untuk ke sana, aku harus melintasi lorong sempit yang gelap gulita, tanpa penerangan, dan tentu saja harus ekstra hati-hati agar tidak terperosok. Kontras betul dengan pusat kota Medan yang gemerlap lampu warna-warni menyala di pelataran taman kota, gedung pencakar langit, dan ikon modern lainnya.

Di sepanjang lorong menuju rumah itu, aku melihat barisan rumah-rumah sempit yang seperti berdiri dalam nafas tertahan. Sebagian dari mereka bahkan sudah pernah kehilangan sebagian tembok rumahnya sehingga tiangan rumahnya semakin menyempit. Dinding rumah mereka harus dirubuhkan sebagaian karena terkena proyek penambahan jalur rel kereta api.

Tak ada perlawanan, tak ada protes berarti. Hanya pasrah. Ganti rugi yang diterima mereka memang ads tapi hanya sekira Rp500 ribu. Ya, lima ratus ribu rupiah untuk tembok rumah yang dirobohkan dengan alasan "menumpang di lahan negara". Murah sekali harga pasrah itu. Tapi memang apa daya? Mereka tahu, mereka hidup di tanah milik PT. Kereta Api.

Di lorong itu, kami duduk bersila di atas tikar dan terpal, menutupi badan jalan yang hanya cukup untuk satu dua sepeda motor yang lewat dan ketika berselusih harus ada dalah satu yang mengalah untuk berhenti. Di sebelah kami, pagar rel kereta berdiri dingin. Sebagian dari kami bahkan menyandarkan punggung ke dinding rel itu.

Baru saja lantunan ayat-ayat Al-Quran menggema, kereta api melintas. Suara keras seperti raungan monster baja menelan bacaan imam. Setidaknya tiga kali dalam sejaman lebih kami harus berhenti sejenak. Telinga kami nyeri, pembacaan tersendat, dan konsentrasi pecah. Speaker tak bisa melawan deru si ular besi.

Di tengah hiruk dan bising itu, pikiranku melayang ke proyek revitalisasi Lapangan Merdeka Medan. Proyek mewah yang menghabiskan hampir setengah triliun rupiah. Pusat kota kita kini tampil menawan, instagenik, dipoles seperti ruang tamu menjelang Lebaran. Tapi bagaimana dengan dapur masyarakat yang tinggal di pinggiran rel itu? Mereka yang hidup di bawah ancaman penggusuran, suara bising, dan ketidakpastian hukum tanah?

Seandainya dana proyek Lapangan Merdeka itu dialihkan atau setidaknya dibagi untuk merelokasi warga pinggiran rel dan membangunkan rumah layak gratis bagi mereka, Medan akan punya wajah lain. Wajah yang tak sekadar indah di foto, tapi juga hangat bagi warganya yang termarjinalkan.

Bahkan jika rumah gratis terasa terlalu muluk, memberikan lahan legal murah atau gratis untuk mereka bangun sendiri pun sudah cukup menyelamatkan masa depan.

Faktanya, dengan segala keterbatasan mereka bisa membangun di atas tanah PT. KA meski dengan triplek, seng bekas, atau batako sumbangan. Bayangkan jika diberi kejelasan status dan dukungan sedikit saja dari negara.

Sebaliknya, gedung Lapangan Merdeka yang sudah diresmikan itu hingga kini belum benar-benar rampung. Tidak jelas siapa yang menikmati manfaatnya. Jika pun ada di antara warga lorong itu yang pedagang asongan, bisa dipastikan mereka tak akan diizinkan berjualan di sana. Satpol PP akan datang, satpam akan menghardik. Mereka tak punya tempat di kawasan kota yang katanya untuk semua.

Menyewa booth? Mimpi. Biaya sewanya bisa lebih besar dari penghasilan bulanan mereka. Alih-alih menjadi ruang bersama, Lapangan Merdeka kini justru seperti taman eksklusif. Dibangun dengan uang rakyat, tapi tak bisa disentuh oleh rakyat kelas bawah.

Pembangunan kita hari ini seperti monolog elite, ramai, mewah, dan megah di permukaan, tapi bisu terhadap suara mereka yang tinggal di sela rel kereta. Mereka yang setiap hari menyulap bising menjadi tidur, menyulap lorong menjadi rumah, menyulap penggusuran jadi pasrah.

Dan kita menyebut ini kota modern?

Dalam Islam, rumah adalah hak dasar, tempat berlindung dan menenangkan jiwa. Rasulullah saw bersabda, "Di antara kebahagiaan seseorang adalah rumah yang luas."

Tapi bagaimana bisa ada kebahagiaan jika rumah berdiri di atas ketakutan digusur, di bawah bising rel, dan di luar perhatian negara? (HR. Annasa'i dan Ahmad).

Maka mungkin sudah waktunya kita menimbang ulang arah pembangunan ini, apakah sekadar megah di mata dunia, atau juga rahmah bagi manusia? Sebab kota yang baik bukan hanya yang tampak terang, tapi yang adil bagi seluruh warganya.**(*)**

PDIP Desak KPK .....

Dari Halaman 1

kan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menilai vonis 3,5 tahun penjara untuk Hasto adalah bentuk politisasi hukum.

Menurutnya, tidak terbukti uang suap terkait PAW Anggota DPR 2019-2024 itu berasal dari Hasto. Djarot menegaskan hakim hanya mengandalkan bukti-bukti dari chat WhatsApp.

"Kalau mau fair betul, ya tangkaplah Harun Masiku. Jangan kemudian Mas Hasto dikorbankan. Inilah praktik dari politisasi hukum," kata Djarot usai Talkshow Peristiwa 27 Juli 1996 Sebagai Tonggak Demokrasi Indonesia di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Minggu (27/7).

"Forum pengadilan kemarin itu lebih banyak kepada forum pengadilan yang politik. Ini persoalan politik dan Pak Sekjen (Hasto) itu menjadi tahanan politik. Karena berbeda dengan penguasa, berbeda dengan raja yang tidak mau dikritik, maka dicari-cari kesalahannya," kritiknya.

Djarot kemudian mengutip pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menegaskan Indonesia adalah negara hukum, bukan berbasis kekuasaan. Ia mewanti-wanti penguasa agar tak menjadikan kekuasaannya hanya untuk mengkriminalisasi orang yang berbeda sikap.

Kendati demikian, Djarot menegaskan Hasto Kristiyanto sampai sekarang tetap berstatus Sekjen PDI Perjuangan.

Sedangkan Penasihat Hukum Hasto sekaligus Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy menegaskan pihaknya bakal fokus membela sang sekjen. Ia menghormati putusan pengadilan, tapi akan tetap mempersiapkan upaya hukum lanjutan..**(cnni/js)**

Biadab! Israel .....

Dari Halaman 1

Langkah itu memicu kecaman luas, terutama dari kalangan organisasi hingga aktivis kemanusiaan. Gelombang protes bermunculan karena kondisi kelaparan di Palestina yang semakin parah sejak agresi berlangsung pada Oktober 2023.

Sejumlah laporan menggambarkan situasi tersebut begitu mengerikan karena orang-orang bertahan hidup dengan pakan ternak, rumput, atau tidak sama sekali.

Para pengungsi juga hanya bergantung kepada kulit kentang, tepung dari kulit jagung kering, hingga tumbuhan gulma yang dipungut. Usaha bertahan hidup di tengah kelaparan itu terjadi karena akses terhadap bahan pangan pokok nyaris terputus.

Keadaan serupa terjadi di rumah sakit. Sejumlah dokter melaporkan peningkatan kematian akibat malnutrisi, terutama di kalangan anak-anak, orang tua, dan orang dengan penyakit kronis.

Data terkini Kementerian Kesehatan Gaza bahkan menunjukkan 11,5 persen anak menderita kurang gizi akut. Angka itu sudah masuk dalam kategori bencana jika mengacu standar kesehatan global.

Sementara itu, Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) turut buka suara soal kondisi tersebut. UNRWA menegaskan krisis kelaparan yang melanda menghancurkan banyak keluarga di Palestina.

"Orang tua terlalu lapar untuk mengurus anak-anak mereka. Mereka yang datang ke klinik UNRWA tidak memiliki energi, makanan, atau sarana untuk mengikuti saran medis," ujar Kepala UNRWA Philippe Lazzarini via X/Twitter..**(cnni/js)**

Jurnalis Profetik

Dari Halaman 1

(amar ma'ruf), liberasi (nahi munkar), dan transendensi (iman kepada Tuhan). Dalam praktik jurnalisme, tiga pilar ini menjadi kerangka etika yang menuntun seorang jurnalis tidak hanya sekadar menjadi penyampai berita, tetapi juga pendidik dan pembawa pencerahan.

Media modern kerap terjebak dalam logika kapitalisme: rating, klik, dan viralitas menjadi ukuran utama. Judul bombastis (clickbait) digunakan demi mendongkrak kunjungan. Sayangnya, hal ini justru memunculkan informasi dangkal, penuh sensasi, bahkan hoaks. Di sinilah jurnalis profetik hadir untuk meluruskan arah: menyampaikan fakta dengan adil, memihak pada kebenaran, dan memberi makna pada informasi.

Jurnalis profetik tidak mengejar sensasi, melainkan kebenaran dan pencerahan publik. Mereka bekerja dengan prinsip tabligh (menyampaikan dengan jujur), sidq (kejujuran), dan amanah (tanggung jawab). Dengan kata lain, jurnalis profetik melihat pekerjaannya sebagai amanah moral, bukan sekadar profesi.

Era digital menghadirkan tantangan baru bagi jurnalisme. Pertama, disinformasi dan hoaks menyebar begitu cepat. Tanpa verifikasi yang ketat, jurnalis bisa ikut terjebak menjadi bagian dari penyebaran informasi palsu. Kedua, tekanan industri media membuat jurnalis lebih fokus pada kecepatan ketimbang kualitas. Ketiga, kecerdasan buatan (AI) mulai menggantikan fungsi dasar jurnalistik seperti penulisan berita sederhana, sehingga nilai humanis semakin terancam hilang.

Namun, teknologi juga memberikan peluang. Jurnalis profetik bisa memanfaatkan media sosial untuk berdakwah dengan cara kreatif, misalnya melalui video inspiratif, podcast pencerahan, atau narasi mendalam yang memuat nilai moral dan keadilan sosial.

Untuk membangun media berakhlak, dibutuhkan jurnalis yang memiliki hati nurani. Berita bukan hanya komoditas, tetapi juga sarana membentuk peradaban. Media profetik mengangkat kisah-kisah kemanusiaan, mengkritisi ketidakadilan, dan menghadirkan optimisme di tengah pesimisme publik.

Contoh nyata dari jurnalisme profetik adalah liputan yang mengangkat nasib kaum miskin atau korban ketidakadilan tanpa mengumbar penderitaan mereka sebagai sensasi, melainkan dengan empati. Media profetik juga mampu memfasilitasi dialog lintas agama, budaya, dan etnis demi memperkuat harmoni sosial.

Dalam Islam, jurnalis profetik ibarat mujahid kebenaran. Pena dan lensa mereka menjadi alat perjuangan untuk menegakkan keadilan. Mereka tidak hanya bertanya, "Apa yang terjadi?", tetapi juga, "Apa makna peristiwa ini bagi kemanusiaan?" Jurnalis profetik mengingatkan kita bahwa berita bukan sekadar kumpulan fakta dingin, tetapi cerminan nilai moral yang mendalam.

Penutup

Di era digital yang penuh tantangan, kita membutuhkan jurnalis profetik—jurnalis yang menulis dengan hati, memihak kebenaran, dan berpijak pada nilai transendental. Jurnalisme bukan hanya tentang siapa yang pertama memberitakan, tetapi siapa yang paling bermakna dalam memberikan pencerahan. Jika media mampu mengadopsi prinsip profetik, maka dunia jurnalistik akan menjadi cahaya, bukan sekadar kebisingan informasi